

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Kemiskinan jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan sosial, menurunnya kualitas sumber daya manusia, dan melemahnya daya saing masyarakat dalam pembangunan (Suharto, 2016).

Pemerintah Indonesia menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program rehabilitasi sosial, yang bertujuan memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, dan kelompok masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan material, tetapi juga pada pendampingan sosial, penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Keberhasilan program rehabilitasi sosial sangat ditentukan oleh proses implementasi program dilapangan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan sosial yang telah dirumuskan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh para pelaksana. Implementasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan tujuan program tidak tercapai secara optimal, meskipun kebaikan tersebut telah dirancang dengan baik (Nuhdin, 2024).

Namun, Berbagai penelitian dan data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. (Badan Pusat Statistik, 2024), mencatat bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia berada di desa, dengan karakteristik pekerjaan informal, pendapatan tidak tetap, dan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Fakta ini menunjukkan bahwa desa merupakan wilayah prioritas dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Dalam perspektif Islam, upaya membantu masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang diperintahkan oleh Allah Swt. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'un ayat 1–3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢)
وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Artinya:

"Tahukah engkau (Muhammad) orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." (Q.S. Al-Ma'un [107]: 1–3).

Penelitian (Suharto, 2010) menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta lemahnya fungsi sosial individu dan keluarga. Fakta ini memperkuat bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan finansial, melainkan memerlukan pendekatan rehabilitasi sosial yang komprehensif.

Secara normatif dan empiris, penelitian kebijakan sosial menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam melindungi kelompok rentan melalui program kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memulihkan fungsi sosial masyarakat miskin. Fakta ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial bukan sekadar kebijakan opsional, tetapi merupakan mandat konstitusional.

Hasil penelitian Edward III (1980), menunjukkan bahwa banyak kebijakan sosial gagal mencapai tujuan bukan karena desain kebijakan yang lemah, tetapi karena kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi, serta rendahnya komitmen pelaksana. Fakta ini sering ditemukan dalam implementasi program sosial di tingkat lokal, termasuk di wilayah pedesaan.

Penelitian tentang implementasi kebijakan sosial di desa menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping sosial menjadi salah satu hambatan utama. Pendamping sering menangani wilayah yang luas dengan jumlah penerima manfaat yang banyak, sehingga proses pendampingan tidak berjalan optimal. Fakta ini berdampak pada kurang efektifnya rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian masyarakat miskin (Nugroho, 2017).

Penelitian (Zastrow, 2017) menunjukkan bahwa banyak program rehabilitasi sosial belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan fungsi sosial penerima manfaat. Bantuan yang diberikan sering bersifat jangka pendek dan belum disertai penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal program rehabilitasi sosial dengan kondisi faktual di lapangan.

Beberapa studi kebijakan sosial menunjukkan bahwa penelitian tentang implementasi program rehabilitasi sosial

masih lebih banyak dilakukan pada level nasional atau kabupaten, sementara kajian mendalam di tingkat desa masih terbatas. Fakta ini menyebabkan kurangnya informasi empiris mengenai bagaimana program benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat desa (William N. Dunn, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang merupakan salah satu desa pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar ± 1.500 – 1.600 jiwa atau ± 440 – 450 Kepala Keluarga (KK), dengan mayoritas warga bermata pencaharian sebagai petani, buruh harian, dan pekerja sektor informal. Tingkat pendapatan yang tidak tetap menyebabkan sebagian masyarakat masih tergolong miskin atau rentan miskin, sehingga desa ini menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti implementasi program rehabilitasi sosial (Pemerintah Desa Jeranglah Tinggi, 2024).

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial di desa ini melibatkan beberapa instansi penting. Kantor Desa Jeranglah Tinggi berperan sebagai pusat administrasi, pengelola data keluarga miskin, dan penanggung jawab pelaksanaan program bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, PKH, dan BPNT (Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024). Kecamatan Manna berfungsi sebagai pengawas dan koordinator antara pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten, memastikan

program berjalan sesuai dengan regulasi dan sasaran yang telah ditetapkan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024). Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola program rehabilitasi sosial di tingkat kabupaten, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di desa (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Secara regional, Provinsi Bengkulu masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. Data BPS Provinsi Bengkulu (2024) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin masih berada di atas rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten, Bengkulu Selatan mencatat persentase penduduk miskin sekitar 17%, dengan jumlah penduduk miskin ± 31.000 jiwa dan garis kemiskinan $\pm \text{Rp}490.000$ per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

Kondisi kemiskinan tersebut juga terlihat di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, yang memiliki ± 1.500 – 1.600 jiwa atau ± 440 – 450 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar warga bekerja di sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan penghasilan tidak menentu. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial, masih terdapat puluhan keluarga miskin dan rentan miskin yang menjadi penerima program bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, PKH, dan BPNT. Kemiskinan di desa ini ditandai oleh rendahnya pendapatan, keterbatasan keterampilan kerja

produktif, pendidikan yang rendah, dan ketergantungan pada bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Desa Jeranglah Tinggi bersifat multidimensional, sehingga diperlukan intervensi rehabilitasi sosial yang menyeluruh.

Meskipun program rehabilitasi sosial dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial masyarakat miskin, implementasinya di Desa Jeranglah Tinggi menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah pendamping sosial, sehingga proses pendampingan tidak dapat menjangkau seluruh keluarga miskin secara merata. Hal ini menyebabkan sebagian warga yang seharusnya menerima manfaat program belum mendapatkan pendampingan yang optimal (Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program masih rendah, karena sebagian warga belum memahami tujuan rehabilitasi sosial atau masih mengandalkan bantuan material sehingga kurang aktif mengikuti pelatihan keterampilan, kegiatan pemberdayaan, atau program pendukung lainnya.

Kendala lainnya adalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal, terutama antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya. Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan dan pelaksanaan program tidak selalu tepat sasaran.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas turut menjadi hambatan, karena dana yang tersedia tidak cukup untuk menjangkau seluruh keluarga miskin di desa. Akibatnya, program sering bersifat parsial dan dampaknya belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Terakhir, kurangnya evaluasi dan monitoring yang sistematis membuat kendala dalam pelaksanaan program sulit diidentifikasi dan diperbaiki secara cepat, sehingga efektivitas jangka panjang program menjadi terbatas (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Program rehabilitasi sosial yang diterapkan di Desa Jeranglah Tinggi memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat miskin, baik secara individu maupun keluarga. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kemandirian ekonomi, karena masyarakat diberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan bantuan modal yang membantu mereka memperoleh penghasilan tambahan. Dengan demikian, ketergantungan pada bantuan sosial dapat berkurang secara bertahap (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Selanjutnya, program rehabilitasi sosial mempermudah akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan pemerintah lainnya. Dengan adanya pendampingan sosial, warga yang sebelumnya kesulitan mengakses fasilitas publik kini lebih mampu memanfaatkan layanan tersebut secara optimal (Badan Pusat

Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024). Secara jangka panjang, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, karena warga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Jeranglah Tinggi, sekaligus menjadi landasan penting bagi perbaikan dan pengembangan program ke depan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bersama pemerintah desa telah melaksanakan program rehabilitasi sosial di Desa Jeranglah Tinggi. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam memulihkan fungsi sosial, meningkatkan keterampilan, serta mendorong kemandirian ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya diduga masih terdapat kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, keterbatasan pendampingan sosial, dan belum optimal koordinasi antar pihak terkait (Nuhdin, 2024).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, implementasi program rehabilitasi sosial ditingkat lokal sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Masalah ketetapan sasaran, keberlanjutan program, serta

dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan kajian mendalam terhadap pelaksanaan program rehabilitas sosial, khususnya tingkat desa (Ismowati & Hasibuan, 2025).

Berdasarkan Hasil Pra survey yang dilakukan penelitian di Desa Jeranglah Tinggi pada tanggal 29 oktober 2025, di temukan bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di lokasi penelitian. Di lapangan program rehabilitasi social masih menghadapi kendala dalam hal ketepatan sasaran, keberlanjutan program, serta dampaknya belum sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat. Temuan awal ini memeperkuat pentingnya dilakukan penelitan lebih lanjut untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan program rehabilitasi social ditingkat desa.

Oleh karena itu, penelitian mengenai “Impelmentasi Program Rehabilitas Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Desa Jeranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai proses pelaksanaan program rehabilitas sosial, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta dampaknya terhadap masyarakat miskin sebagai penerima manfaat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas

program kesejahteraan sosial dimasa mendatang (Sobri *et al.*, 2025).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan implementasi program rehabilitasi sosial bagi masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Desa Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana dampak program rehabilitasi sosial terhadap kondisi sosial masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Desa Jeranglah Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan implementasi program rehabilitasi sosial bagi masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dalam program rehabilitasi sosial terhadap kondisi sosial masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi, khususnya

terkait kajian mengenai dampak program kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin.

- b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan akademis untuk penelitian selanjutnya yang membahas konsep pemberdayaan, rehabilitasi sosial, dan perubahan sosial pada masyarakat di tingkat pedesaan.
- c. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep tentang keberfungsian sosial, keterlibatan masyarakat, dan transformasi sosial yang terjadi akibat intervensi kebijakan pemerintah.
- d. Dapat digunakan sebagai dasar teori untuk pengembangan model analisis dampak sosial pada program-program serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial sehingga pemerintah mampu menentukan strategi intervensi yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat miskin di tingkat desa.

- b. Bagi Pemerintah Desa Jeranglah Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi desa, termasuk

peningkatan efektivitas pendampingan, penyaluran bantuan, serta program pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Penerima Program

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat program rehabilitasi sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosial sehingga tercipta kemandirian dan keberdayaan sosial ekonomi.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, pembanding, maupun referensi metodologis dalam pengembangan penelitian lanjutan terkait rehabilitasi sosial, kemiskinan, dan pembangunan masyarakat.

e. Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan menjadi sarana pengembangan kemampuan akademik, analisis sosial, serta memperkuat pemahaman mendalam mengenai proses perubahan sosial berbasis program rehabilitasi sosial.

E. Definisi Istilah

Implementasi merujuk pada tahap pelaksanaan atau penerapan kebijakan/program yang telah dirancang oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, mencakup mekanisme kegiatan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat penerima manfaat. Dalam penelitian

ini, implementasi difokuskan pada program rehabilitasi sosial di desa Jeranglah Tinggi (Nuhdin, 2024).

Program rehabilitasi sosial adalah serangkaian layanan dan intervensi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami masalah sosial dengan tujuan memulihkan fungsi sosial mereka sehingga mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Program ini tidak hanya berupa bantuan ekonomi, tetapi juga pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, penguatan kepercayaan diri, serta pemberdayaan ekonomi produktif. Tujuan paling mendasar dari rehabilitasi sosial adalah mengurangi ketergantungan pada bantuan dan meningkatkan kapasitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Suharto, 2010).

Masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak karena keterbatasan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya partisipasi dalam pembangunan. Masyarakat miskin sering mengalami kerentanan sosial dan memerlukan program intervensi agar dapat keluar dari lingkaran ketidakmampuan ekonomi (Seokanto, 2015).

Menurut BPS Bengkulu Selatan (2022), Desa Jeranglah Tinggi merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini didominasi oleh masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh harian, sehingga tingkat pendapatan penduduk sebagian besar berada di kategori rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bengkulu Selatan, desa ini termasuk kawasan dengan presentase masyarakat berpenghasilan rendah yang cukup signifikan sehingga menjadi objek yang tepat untuk penelitian dampak program rehabilitasi sosial.

Menurut Kemendes PDTT RI. (2021), Pemberdayaan berbasis komunitas adalah proses pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan sosial. Pemberdayaan mengutamakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri, sehingga tercipta kemandirian tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Program rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk strategi pemberdayaan berbasis komunitas yang diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian dan kualitas hidup kelompok rentan.